

RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH BUMBU

T A H U N
2022

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2021

K A T A P E N G A N T A R

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 dapat tersusun.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022, untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu beserta indikatornya, program dan kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan. Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022.

Kami menyadari bahwa Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Batulicin , Juli 2021
KEPALA DINAS



MAHRIYADI NOOR, S.Sos, MA
NIP.19660118 198602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Lalu	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu	18
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu	39
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu.	43
BAB V Penutup	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2020 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2021 DLH Kab. Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu	10
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2021 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2021	11
Tabel 2.3	Realisasi Keuangan DLH Kab. Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020	16
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran DLH Kab. Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu Sampai Dengan Tahun 2020.....	19
Tabel 2.5	Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Sampai Dengan Tahun 2020	20
Tabel 2.6	Review terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu	26
Tabel 2.7	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu	28
Tabel 3.1	Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022	40
Tabel 3.2	Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017	41
Tabel 3.3	Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020	42
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD.....	1
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

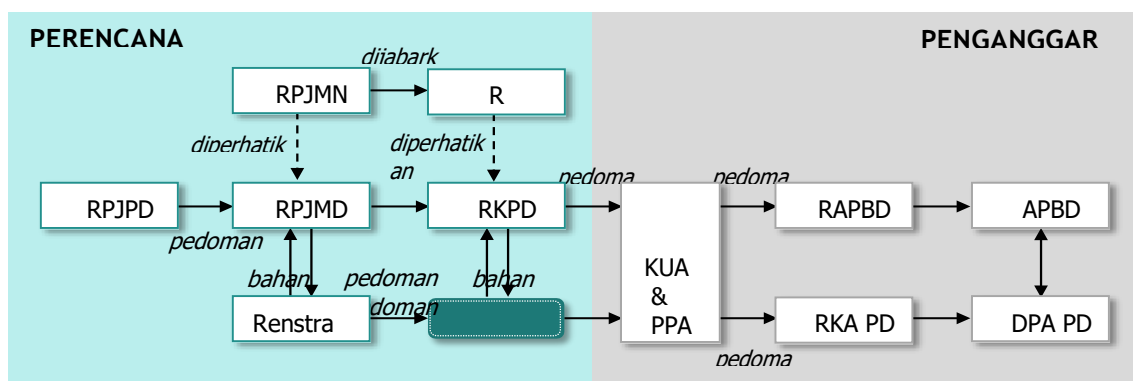
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Tanah Bumbu sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu. Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 juga mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022. Dimana penyusunan Renja dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD; dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Lingkungan Hidup, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Nama SKPD, termasuk evaluasi terhadap output pada Renja Tahun 2022 yang terdampak pandemi COVID-19.

Perencanaan program kegiatan pada renja tahun 2022 merupakan pelaksanaan amanat dari renstra DLH yang sesuai dengan tujuan sasaran bidang lingkungan hidup pada RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2021 – 2026. Dari 5 Misi pembangunan, keterkaitan DLH adalah pada misi ke-2 dan misi ke-3. Pada Misi ke-2, meskipun secara tidak langsung namun ada 1 (satu) Program yang dilaksanakan DLH yaitu Program Pengelolaan persampahan untuk mendukung terwujudnya Tujuan Daerah yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang mantap, dengan indikator Infrastruktur yang mantap dan Sasaran Daerah yaitu Meningkatkan kualitas air minum dan sanitasi, dengan indikator Cakupan pelayanan air minum aman dan Cakupan akses sanitasi Layak. Sedangkan terkait dengan Misi ke-3 Bidang Lingkungan Hidup adalah untuk mendukung tujuan Daerah Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan sasaran yang dicapai adalah Meningkatkan kualitas air dan udara dengan indikatornya penurunan emisi GRK, Indeks Kualitas Air, Indeks

Kualitas udara, serta sasaran kedua adalah Meningkatkan Tutupan lahan dengan indikatornya yaitu Indeks Kualitas Lahan. Dari target daerah tersebut, diuraikan perencanaan tingkat SKPD dalam hal ini DLH untuk mendukung pencapaian sasaran dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 yang juga dilandasi oleh hasil evaluasi kondisi lingkungan di tahun 2021 dengan alat ukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) beserta komponen penunjangnya.

Selanjutnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Sumber Daya Alam;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.23/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara & Persyaratan Pengelolaan LB3;

19. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan RI Nomor : SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkung;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup;
24. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup;
25. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Tanah Bumbu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
26. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor.....Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan

kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu,

analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu, review terhadap Rancangan Akhir RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI

RENJA DINAS

LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN LALU

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KABUPATEN TANAH BUMBU

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja DLH Kab. Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja DLH Kab. Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra DLH Kab. Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan tahun 2021.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 DLH Kab. Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu

Pada tahun 2020 DLH Kab. Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan 6 (enam) program dan 19 (sembilan belas)

kegiatan, sebagaimana tercantum pada Perubahan Renja Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah “**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**” dengan target tahun 2020 sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100% (tingkat capaian 100 %).

Pada program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan, dimana target indikator kinerja dari seluruh kegiatan tersebut telah tercapai 100%.

2) **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah “**Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur**” dengan target tahun 2020 sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 % (tingkat capaian 100 %). Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, dimana target indikator kinerjanya tercapai 100% (berupa penyedia 170 stel pakaian khusus hari-hari tertentu)

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2020 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021 DLH Kab. Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2020 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2021
DLH Kab. Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s.d. tahun berjalan	
					Target Renja DLH Tahun 2020	Realisasi Renja DLH Tahun 2020	Tingkat capaian (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. tahun 2021	Tingkat Capaian realisasi target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	WAJIB									
	LINGKUNGAN HIDUP									
2.05.2.05.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah dikelola	73,61%	70,52%	72,04%	72,08%	100,05%			
2.05.2.05.01.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Sampah yang dikelola (Ton)	57084,07	29660,00	10.635,00	10578	99,46%			
2.05.2.05.01.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah Sampah yang ditangani (Ton)	242832,46	135596,00	42565,00	42586,72	100,05%			
2.05.2.05.01.16	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingk.	Tingkat Pencemaran Kualitas Lingkungan (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks))	Kurang (60,96)	Cukup (71,79)	Kurang (60,96)	Cukup (71,79)	117,77%			
2.05.2.05.01.16.03	Pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah Sampel Kualitas Lingkungan (jumlah sampel)	116,00	33,00	116	183	157,76%			
2.05.2.05.01.16.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup (Laporan)	16	11,00	4	4	100,00%			
2.05.2.05.01.16.06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah Penyelesaian Perizinan Bidang LH (rekomendasi)	75	41,00	36	63	175,00%			
2.05.2.05.01.16.26	Pengujian Sampel Kualitas Lingkungan	Jumlah layanan laboratorium (Sampel)	23700	19518,00	6000	5470	91,17%			
2.05.2.05.01.16.14	Pembinaan masyarakat yang berperan aktif dalam pengendalian LH	Jumlah pembinaan terhadap pelaku yang berperan dalam pengendalian lingkungan hidup (pelaku)	82	12,00	70	70	100,00%			
2.05.2.05.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Presentase Upaya Adaptasi dan Mitigasi	30,00%	73,81%	30%	0	0,00%			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s.d. tahun berjalan	
					Target Renja DLH Tahun 2020	Realisasi Renja DLH Tahun 2020	Tingkat capaian (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. tahun 2021	Tingkat Capaian realisasi target Renstra
2.05.2.05.01.17.05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	- Jumlah Lokasi yang diusulkan menjadi kampung iklim (Lokasi)	2	1,00	1	10	1000,00%			
2.05.2.05.01.17.19	Koordinasi pengelolaan konservasi sumberdaya alam	Jumlah dokumen informasi lingkungan	8	6,00	1	0	0,00%			
2.05.2.05.01.25	Penanaman Bambu pada Kanan dan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah	Persentase Tutupan Vegetasi	100,00%	74,67%	100%	81,33%	90,67%			
2.05.2.05.01.25.01	Penanaman bambu di kanan kiri sungai	Luas Lahan yang direhabilitasi (Ha)	7,50	5,60	1,9	1,20	63,16%			

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2021 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2021
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
2.11.01	Program : Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	50%	50,00%

2.11.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	50%	50,00%
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (Bulan)	72	60	12	6	50,00%
2.11.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	50%	50,00%
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (unit)	269		54	9	16,67%
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terbayarnya tagihan langganan surat kabar kantor (bulan)	72	60	12	6	50,00%
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terlaksana (bulan)	72	60	12,00	6	50,00%
2.11.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	50%	50,00%
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya alat, bahan, dan jasa kebersihan kantor (bulan)	72	60	12,00	6	50,00%
2.11.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	50%	50,00%
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dipelihara (bulan)	72	60	12,00	6	50,00%
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	7	0%	1,00	1	100,00%
2.11.01.2.10	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	83,19	100,00	-	0,00%
2.11.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pengujian sampel	37400	24988	6000,00	3.031	50,52%
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tingkat pencemaran kualitas lingkungan (Indeks-IKLH)	60,96	70,39	60,96	0,00	0,00%
2.11.03.2.01	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengendalian pencemaran kerusakan LH yang dilaksanakan	100%	100%	100%	0,00%	0,00%

2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Sampel Kualitas Lingkungan (sampel)	350	183	284,00	189	66,55%
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Lokasi yang diusulkan menjadi kampung iklim (kampung)	6	11	1,00	13	1300,00%
2.11.03.2.02	Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penanggulangan pencemaran & kerusakan LH yang dilaksanakan	100%	100%	100,00%	0%	0,00%
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Dokumen Informasi Lingkungan (dokumen)	5		2,00	0	0,00%
2.11.03.2.03	Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pemulihan pencemaran kerusakan LH yang dilaksanakan	100%	100%	100,00%	41,05%	41,05%
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas Lahan yang direhabilitasi (Ha)	10	6,8	1,90	0,78	41,05%
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat pencemaran kualitas lingkungan (Indeks-IKLH)	60,96	70,39	60,96	0	0,00%
2.11.05.2.01	Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase rekomendasi teknis penyimpanan limbah B3 yang diterbitkan	100,00%	100,00%	100%	11,67%	11,67%
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara LB3	Jumlah rekomendasi izin pengelolaan LB3	178,00	104	18	14	77,78%
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat pencemaran kualitas lingkungan (Indeks-IKLH)	60,96	70,39	60,96	0	0,00%
2.11.06.2.01	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang tertib ijin lingkungan	100,00%	70,37%	100,00%	70,83%	70,83%

2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi ijin pengelolaan LB3	149,00	104	18	12	66,67%
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup , Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Laporan hasil pengawasan dan pengaduan kebijakan bidang LH	24,00	15	4	0	0,00%
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Tingkat pencemaran kualitas lingkungan (Indeks-IKLH)	60,96	70,39	60,96	0	0,00%
2.11.07.2.01	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang diakui	100,00%	0%	100,00%	0,00%	0,00%
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA KearifanLokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah pembinaan terhadap pelaku yang berperan dalam pengendalian LH	420,00	82	70	69	98,57%
2.11.07.2.02	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase pemberdayaan MHA	100,00%	0	100,00%	0,00%	0,00%
2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah pembinaan terhadap pelaku yang berperan dalam pengendalian LH	420,00	82	70	69	98,57%
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Tingkat pencemaran kualitas lingkungan (Indeks-IKLH)	60,96	70,39	60,96	0	0,00%
2.11.08.2.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pegiat LH yang ditingkatkan wawasannya	100,00%	0%	100,00%	33,33%	33,33%
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan terhadap pelaku yang berperan dalam pengendalian LH	210,00	82	70	69	98,57%

2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan terhadap pelaku yang berperan dalam pengendalian LH	30,00	82	70	69	98,57%
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat pencemaran kualitas lingkungan (Indeks-IKLH)	60,96	70,39	60,96	0	0,00%
2.11.10.2.01	Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan masyarakat yang difasilitasi	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab/ Kota	Laporan hasil pengawasan dan pengaduan kebijakan bidang LH	24,00	15	4	0	0,00%
2.11.11	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang dikelola	73,61%	72,08%	73,61%	35,55%	48,30%
2.11.11.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang ditangani	100,00%	72,08%	100,00%	48,30%	48,30%
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA,TPST, SPA Kab/ Kota	Jumlah sampah yang ditangani	267087,51	178182,72	43629,00	21072,00	48,30%
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang dikelola	124064,44	40238	10668,00	5553,00	52,05%
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan di TPA/TPST/TPA Kab/Kota	Jumlah sampah yang ditangani	267087,51	178182,72	43629,00	21072,00	48,30%

Sumber : DLH Kab. Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu, 2021

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan DLH Kab. Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan DLH Kab. Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Realisasi Keuangan DLH Kab. Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	19.594.837.963	18.637.751.916	95,12	957.086.047
	Belanja Tidak Langsung	4.934.602.163	4.745.657.355	96,17	188.944.808
	Belanja Pegawai	4.934.602.163	4.745.657.355	96,17	188.944.808
1	Gaji dan Tunjangan	2.744.554.663	2.678.855.966	97,60	65.698.697
2	Tambahan Penghasilan PNS	2.190.047.500	2.069.845.650	94,51	120.201.850
	Belanja Langsung	14.660.235.800	13.892.094.561	94,76	768.141.239
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.086.393.800	8,629,266,350	94,97	457.127.450
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	1.435.375.000	1.122.404.800	78,20	312.970.200
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.462.000	7.444.000	99,76	18.000
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.501.800	11.495.700	99,95	6.100
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.280.000	1.890.000	82,89	390.000
5	Penyediaan makanan dan minuman	16.200.000	15.700.000	96,91	500.000
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	123.550.000	120.047.060	97,16	3.502.940
7	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	7.455.675.000	7.319.534.790	98,17	136.140.210
8	Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah	34.350.000	30.750.000	89,52	3.600.000
B	Program peningkatan disiplin aparatur	68.750.000	68,641,200.00	99,84	108.800

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	68.750.000	68,641,200.00	99,84	457.127.450
C	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1,577,202,000	1.408.039.249	89,27	169.162.751
1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	689,647,000	668.552.600	96,94	21.094.400
2	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	887,555,000	739.486.649	83,32	148.068.351
D	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingk.	3.636.560.000	3,497,431,562	96,17	139.128.438
1	Pemantauan kualitas lingkungan	75.450.000	75.450.000	100	-
2	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH	73.260.000	70.860.000	96,72	2.400.000
3	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	16.800.000	16.800.000	100	-
4	Pengujian Sampel Kualitas Lingkungan	3.415.000.000	3.280.021.562	96,05	134.978.438
5	Pembinaan masyarakat yang berperan aktif dalam pengendalian LH	56.050.000	54,300,000	96,88	1.750.000
E	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	127.400.000	124.786.200	97,95	2.613.800
1	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	120.500.000	117,886,200	97,83	2.9613.800
2	Koordinasi pengelolaan konservasi sumberdaya alam	6.900.000	6.900.000	100	-
F	Penanaman Bambu pada Kanan dan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah	163.930.000	163.930.000	-	-
1	Penanaman bambu di kanan kiri sungai	163.930.000	163.930.000	100	-

Sumber : DLH Kab. Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu, 2021

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2020, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai urusan Lingkungan Hidup, 6 (enam) program dan 19 (Sembilan belas) kegiatan pada DLH Kab. Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebesar **Rp. 19.594.837.963,-** Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar **Rp. 18.637.751.916,- (95,12%)** dengan sisa sebesar **Rp. 957.086.047,- (4,88%)** dengan uraian sebagai berikut :

- a. **Belanja Tidak Langsung**; anggaran sebesar Rp. 4.934.602.163,- dengan realisasi

sebesar Rp. 4.745.657.355,- (96,17%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 188.944.808,- (3,83%).

Untuk Belanja Tidak Langsung, sisa anggaran disebabkan oleh adanya kelebihan penganggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan prestasi (honor tim)

- b. **Belanja Langsung**; anggaran sebesar Rp. 14.660.235.800,- dengan realisasi sebesar Rp.13.892.094.561,- (94,76%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 768,141,239,- (5,24%).

Untuk Belanja Langsung, sisa anggaran umumnya dikarenakan efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga dengan harga pasar.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DLH KAB. TANAH BUMBU KABUPATEN TANAH BUMBU

Penyelenggaraan pelayanan DLH Kab. Tanah Bumbu adalah melaksanakan fungsi sebagai Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Bumbu, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan DLH Kab. Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra DLH Kab. Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran DLH Kab. Tanah Bumbu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
DLH Kab. Tanah Bumbu Kabupaten
Tanah Bumbu Sampai Dengan Tahun
2020

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI			PROYEKSI	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Tujuan : Terjaganya Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$66 \leq x \leq 74$ (cukup dengan nilai 68)	$58 \leq x \leq 66$ (Kurang dengan nilai 60,96)	$58 \leq x \leq 66$ (Kurang dengan nilai 60,96)	$58 \leq x \leq 66$ (Kurang dengan nilai 60,96)	$58 \leq x \leq 66$ (Kurang dengan nilai 60,96)	65 (kurang)	63,45 (kurang)	71,79 (Cukup)	70,39 (Cukup)	70,39 (Cukup)
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	a. Indeks Kualitas Air (IKA)	Sangat Kurang (54,32)	Sangat Kurang (54,32)	Sangat Kurang (54,32)	Sangat Kurang (54,32)	Sangat Kurang (54,32)	60 (Kurang)	61,72 (Kurang)	64,83 (Kurang)	Kurang (60)	Kurang (60)
	b. Indeks Kualitas Udara	Sangat baik (88,69)	Sangat baik (88,69)	Sangat baik (88,69)	Sangat baik (88,69)	Sangat baik (88,69)	86,01 (Sangat Baik)	79,12 (Baik)	94,04 (Unggul)	Unggul (94.21)	Unggul (94.21)
	c. Persentase Tutupan Vegetasi	0	13,33%	46,67%	100%	100%	0.00%	13.33%	74.67%	100%	100%
	d. Cakupan Volume Sampah yang direduksi	16,67 %	17,78 %	20 %	20 %	20 %	16.67%	17.78%	19.97%	20%	20%

Sumber : DLH Kab. Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu, 2021

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran DLH Kab. Tanah Bumbu tahun 2020 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Terjaganya Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup”** memiliki indikator kinerja yaitu “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)”, telah melampaui target, dimana realisasinya dengan nilai indeks 70,39 (Cukup) dari target indeks sebesar 60,96 (Kurang) (tingkat capaian perbandingan nilai indeks 115,46%)
- b. Sasaran **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”** memiliki 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut :
 - 1) Indikator “Indeks Kualitas Air (IKA)” telah melampaui target, dimana realisasinya dengan nilai Indeks 60 (kondisi Kurang) dari target nilai indeks sebesar 54,32 (kondisi sangat kurang) (tingkat capaian perbandingan nilai indeks 110,45%)
 - 2) Indikator “Indeks Kualitas Udara” telah melampaui target, dimana realisasinya

dengan nilai Indeks 94,21 (kondisi Unggu) dari target nilai indeks sebesar 88,6 (kondisi sangat baik (tingkat capaian perbandingan nilai indeks 1106,22%)

- 3) Indikator “Persentase Tutupan Vegetasi” sedikit di bawah target yang ditetapkan, dimana realisasinya sebesar 90,67% dari target sebesar 100% (tingkat capaian 90,67%). Capaian tersebut belum maksimal dikarenakan luasan lahan yang dilakukan penanaman dari target seluas 1,9 Ha, hanya terealisasi seluas 1,2 Ha akibat adanya penyesuaian anggaran pandemic Covid-19
- 4) Indikator “Cakupan Volume Sampah yang direduksi” sedikit dibawah target, dimana realisasinya sebesar 19,89% dari target sebesar 20% (tingkat capaian 99,45%)

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan DLH Kab. Tanah Bumbu dalam pelaksanaan fungsinya di bidang Lingkungan Hidup juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan DLH Kab. Tanah Bumbu yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan DLH Kab. Tanah Bumbu sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Sampai Dengan Tahun 2020

- Sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 dan SDGs

No	Indikator Kinerja Makro Daerah	Satuan	Target RENSTRA					Realisasi dan Capaian Kinerja			Proyeksi	Catatan Analisis
			2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/tidak ada	Ada	0	0	0	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/tidak ada	0	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada/tidak ada	0	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Indeks	60	54,32	54,32	54,32	60	61,72	64,83	60	60	
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Indeks	86,01	88,69	88,69	88,69	94,68	79,12	94,04	94,21	94,68	
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks	52,98	52,98	45,15	45,15	58,40	52,98	60,32	60,32	58,40	
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan	%	21,00	67,50	60,00	65,00	100,00 %	66,39%	62,12%	70,37%	100,00%	

No	Indikator Kinerja Makro Daerah	Satuan	Target RENSTRA					Realisasi dan Capaian Kinerja			Proyeksi	Catatan Analisis
			2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
	oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota											
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Orang	1	10	12	14	2	3	2	2	2	
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Kali	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Wilayah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Wilayah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Penetapan hak MHA	Jumlah MHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Jumlah Sarana/P rasarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kali	2	1	2	2	2	2	4	2	2	
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kali	24	15	15	15	5	6	2	2	5	
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
18	Timbulan sampah yang ditangani	%	66,30%	68,45%	70,50%	72,04%	74,00%	68,45%	70,52%	72,08%	74,00%	
19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	16,67%	17,78%	20,00%	20,00%	24,00%	17,05%	19,97%	19,89%	24,00%	
20	Persentase cakupan area pelayanan	%	10,71%	11,90%	16,79%	18,40%	68,46%	65,36%	71,62%	78,47%	68,46%	
21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	66,30%	68,45%	70,50%	72,04%	74,00%	68,45%	70,52%	72,08%	74,00%	
22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai	73,15	74,97	≥ 74	≥ 74	76,38	74,97	75,72	75,72	76,38	
23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Kualitas air danau/embung		Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
26	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Indeks	52,14	60	54,32	54,32	60	61.72 (Kurang)	64.83 (Kurang)	60	60	
27	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	%	66,30%	68,45%	70,50%	72,04%	74,00%	68,45%	70,52%	72,08%	74,00%	
28	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota Kecil		NA	25,79	31,34	31,34	Meningkat /ada	25,79	31,34	31,34	Meningkat /ada	
29	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)						Meningkat				Meningkat	
	- Volume Limbah Padat B3	M3	NA	1.162,065	462.312,31	153.001,46	153.000	1.162,065	462.312,31	153.001,46	153.000	
30	- Volume Limbah Cair B3	M3	NA	348041,0028	47633,08216	12.444.721,94	12.000.000	348041,0028	5847633,08216	12.444.721,94	12.000.000	
31	Volume sampah yang direduksi dengan proses 3R	Ton	8781	9395	10.602	10.635	10.668	6309	10588	10.578	10.668	
32	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Pelaku Usaha	NA	NA	NA	NA	Meningkat	NA	NA	NA	Meningkat	
33	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Indeks	52,98	52,98	45,15	45,15	58,40	52,98	60,32	58,40	58,40	
34	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati		NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	

- Sesuai Permendagri No 18 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target RENSTRA					Realisasi dan Capaian Kinerja			Proyeksi
				2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Indeks	68	60,96	60,96	60,96	73,70	63,45	71,79	70,39	73,70
1.1.		Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	60	54,32	54,32	54,32	60	61,72	64,83	60	60
1.2.		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	86,01	88,69	88,69	88,69	94,68	79,12	94,04	94,21	94,68
1.3.		Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Indeks	52,98	52,98	45,15	45,15	58,40	52,98	60,32	60,32	58,40
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten			80%	81%	82%	82%	83%	82,85%	82,98%	82,98%	83%
2.1		Data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota : Data rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah		0,11 (54 unit truk sampah dibanding volume sampah harian)	0,11 (54 unit truk sampah dibanding volume sampah harian)	0,11 (54 unit truk sampah dibanding volume sampah harian)	0,11 (54 unit truk sampah dibanding volume sampah harian)	0,11 (54 unit truk sampah dibanding volume sampah harian)	0,06 (29 unit truk sampah dibanding volume sampah harian)	0,06 (29 unit truk sampah dibanding volume sampah harian)	0,06 (29 unit truk sampah dibanding volume sampah harian)	0,06 (29 unit truk sampah dibanding volume sampah harian)
2.2		Data kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	Ha	10	10	10	10	15	10	10	10	15
2.3		Data jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan	Buah	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Formulasi : Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten ----- x 100% Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	%	0%	0%	0%	0%	0%	15,15%	6,06%	8,64%	0%
3.1		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota	%	65%	70%	75%	80%	85%	68,08%	73,32%	81,92%	85%
3.2		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kot		0,02 (8 PPLHD dibanding 392 Pelaku usaha berijin Lingkungan/ijin PPLH)	0,02 (8 PPLHD dibanding 392 Pelaku usaha berijin Lingkungan/ijin PPLH)	0,02 (8 PPLHD dibanding 392 Pelaku usaha berijin Lingkungan/ijin PPLH)	0,02 (8 PPLHD dibanding 392 Pelaku usaha berijin Lingkungan/ijin PPLH)	0,02 (8 PPLHD dibanding 392 Pelaku usaha berijin Lingkungan/ijin PPLH)	0,005 (2 PPLHD dibanding 392 Pelaku usaha berijin Lingkungan/ijin PPLH)	0,005 (2 PPLHD dibanding 392 Pelaku usaha berijin Lingkungan/ijin PPLH)	0,005 (2 PPLHD dibanding 392 Pelaku usaha berijin Lingkungan/ijin PPLH)	0,007 (3 PPLHD dibanding 392 Pelaku usaha berijin Lingkungan/ijin PPLH)
3.3		Penetapan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/Kota	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.4		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.5		Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.6		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DLH KAB. TANAH BUMBU KABUPATEN TANAH BUMBU

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH Kab. Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi DLH Kab. Tanah Bumbu, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan DLH Kab. Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Secara umum kinerja pelayanan DLH Kab. Tanah Bumbu Kabupaten

Tanah Bumbu terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Perubahan Renja Tahun 2020 maupun Renstra Tahun 2016-2021 sudah sesuai dengan perencanaan. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan ada beberapa yang terlampaui. Hanya ada beberapa target indikator yang sedikit dibawah targetnya, diantaranya adalah indikator “Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup, Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R”.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi DLH Kab. Tanah Bumbu diantaranya :

- a. Belum optimalnya kesadaran pelaku usaha terhadap pengelolaan LH
- b. Belum optimalnya koordinasi kelembagaan lintas sector terkait pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup
- c. Belum optimalnya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan
- d. Belum optimalnya ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana, SDM yang kompeten serta data dan informasi berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian Lingkungan Hidup dibandingkan dengan peningkatan permasalahan lingkungan

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan DLH Kab. Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya di tahun 2022 mendatang, yaitu sebagai berikut :

- a. Tantangan
 - 1) Faktor Internal
 - Jumlah Sumber Daya Manusia tidak sebanding dengan beban tugas
 - Kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang
 - Dana melaksanakan program dan kegiatan belum memadai
 - 2) Faktor Eksternal

- Rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pengelolaan Lingkungan Hidup

- Kurangnya koordinasi kelembagaan antar sektor
- Dominasi investasi usaha yang berdampak besar dan penting

b. Peluang

1) Faktor Internal

- Adanya kewenangan dalam melaksanakan pengendalian dan pengelolaan Lingkungan Hidup
- Adanya komitmen pimpinan dan pelaksana dalam pengelolaan LH
- Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan berbagai disiplin ilmu

2) Faktor Eksternal

- Adanya dukungan kebijakan Visi dan Misi Kepala Daerah
- Adanya regulasi bidang Lingkungan Hidup
- Dukungan Masyarakat untuk lingkungan hidup yang lebih baik

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan DLH Kabupaten Tanah Bumbu, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan DLH Kab. Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.

Pencapaian visi dan misi Bupati dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu beserta indikator dan targetnya. DLH Kab. Tanah Bumbu sebagai Dinas yang memiliki beberapa fungsi diantaranya merumuskan, melaksanakan kebijakan daerah, evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan visi dan misi Bupati. Karena itu DLH Kab. Tanah Bumbu perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026

b. Pandemi COVID-19 beserta Dampaknya

Terkait terjadinya pandemi COVID-19, DLH Kab. Tanah Bumbu perlu mengkoordinasikan perencanaan tahun 2022 dalam rangka pemulihan paska pandemi. Selain itu pandemi tersebut juga menyebabkan dilakukannya realokasi anggaran pada tahun 2021, dimana alokasi anggaran dari beberapa output strategis harus ditunda pelaksanaannya. Terkait hal ini, DLH Kab. Tanah Bumbu perlu mengkoordinasikan penganggaran kembali output strategis tersebut pada tahun 2022.

c. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan DLH Kab. Tanah Bumbu

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DLH Kab. Tanah Bumbu perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.11	Urusan pemerintahan Bid. LH					Urusan pemerintahan Bid. LH					
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	77	14.245.063.376,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				19.825.000.000,00	
2.11.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	53.057.400,00	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	53.057.400,00	
2.11.01.2.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	2 dok	25.110.900,00	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	2 dok	25.110.900,00	
2.11.01.2.01.06	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	5 dok	27.946.500,00	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	5 dok	27.946.500,00	
2.11.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik	100%	6.137.664.386,00	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik	100%	6.137.664.386,00	
2.11.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	12 Bulan	5.768.131.386,00	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	12 bulan	5.768.131.386,00	
2.11.01.2.02.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	369.533.000,00	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	369.533.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.11.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.057.130.000,00	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.057.130.000,00	
2.11.01.2.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	37 unit	175.772.750,00	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	37 unit	175.772.750,00	
2.11.01.2.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 bulan	226.453.500,00	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 bulan	226.453.500,00	
2.11.01.2.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Media/Buku/ Eksemplar)	2 (Media/ Buku/ Eksemplar)	106.766.100,00	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Media/Buku/ Eksemplar)	2 (Media/ Buku/ Eksemplar)	106.766.100,00	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143 kali	548.137.650,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143 kali	548.137.650,00	
2.11.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	224.842.000,00	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	224.842.000,00	
2.11.01.2.07.09	Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	2 unit	224.842.000,00	Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	2 unit	224.842.000,00	
2.11.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	419.321.200,00	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	419.321.200,00	
2.11.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 bulan	150.577.800,00	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 bulan	150.577.800,00	
2.11.01.2.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	268.743.400,00	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	268.743.400,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.11.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	2.853.048.390,00	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	2.853.048.390,00	
2.11.01.2.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	12 bulan	2.653.620.750,00	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	12 bulan	2.653.620.750,00	
2.11.01.2.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	2 unit	199.427.640,00	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	1 unit	199.427.640,00	
2.11.01.2.10	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD		Akreditasi Badan Layanan Usaha Daerah	226	3.500.000.000,00	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD		Akreditasi Badan Layanan Usaha Daerah	226	3.500.000.000,00	
2.11.01.2.10.01	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jenis Layanan dan penunjang BLUD yang disediakan	11 layanan	3.500.000.000,00	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jenis Layanan dan penunjang BLUD yang disediakan	11 layanan	3.500.000.000,00	
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase Pemenuhan data dok perencanaan LH	83,33	243.694.400,00	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase Pemenuhan data dok perencanaan LH	83,33	243.694.400,00	
2.11.02.2.01	Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota		Persentase Pemenuhan Data Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100	25.000.000,00	Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota		Persentase Pemenuhan Data Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100	25.000.000,00	
2.11.01.2.01.02	Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup	2 dokumen	25.000.000,00	Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup	2 dokumen	25.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.11.02.2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Data Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	100	218.694.000,00	Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Data Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	100	218.694.000,00	
2.11.02.2.02.01	Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	1 dokumen	218.694.000,00	Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	1 dokumen	218.694.000,00	
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase pemenuhan parameter kualitas Lingkungan	90,42%	831.533.960,00	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase pemenuhan parameter kualitas Lingkungan	90,42%	831.533.960,00	
2.11.03.2.01	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Data Kualitas Air, Udara dan Tanah	65%	591.323.960,00	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Data Kualitas Air, Udara dan Tanah	65%	591.323.960,00	
2.11.03.2.01.01	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Sampel Air, Udara dan Tanah	340 sampel	339.238.960,00	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Sampel Air, Udara dan Tanah	340 sampel	339.238.960,00	
2.11.03.2.01.02	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Lokasi Yang Diusulkan Menjadi Kampung Iklim	1 lokasi	252.085.000,00	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Lokasi Yang Diusulkan Menjadi Kampung Iklim	1 lokasi	252.085.000,00	
2.11.03.2.03	Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase lahan sangat kritis di sempadan sungai yang dipulihkan	20%	240.210.000,00	Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase lahan sangat kritis di sempadan sungai yang dipulihkan	20%	240.210.000,00	
2.11.03.2.03.04	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		luas lahan sangat kritis di sempadan sungai yang direhabilitasi	2 Ha	240.210.000,00	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		luas lahan sangat kritis di sempadan sungai yang direhabilitasi	2 Ha	240.210.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	72,73%	3.328.030.000,00	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	72,73%	3.328.030.000,00	
2.11.04.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota		Jumlah Keanekaragaman Hayati yang dikelola sesuai dengan kewenangan	16	3.328.030.000,00	Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota		Jumlah Keanekaragaman Hayati yang dikelola sesuai dengan kewenangan	16	3.328.030.000,00	
2.11.04.2.01.04	Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Jumlah RTH Yang Dikelola	16 lokasi	3.328.030.000,00	Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Jumlah RTH Yang Dikelola	16 Lokasi	3.328.030.000,00	
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase pelaku usaha yang memenuhi ijin Pengelolaan Limbah Bahan Beracun	53%	43.000.000,00	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase pelaku usaha yang memenuhi ijin Pengelolaan Limbah Bahan Beracun	61,67%	43.000.000,00	
2.11.05.2.01	Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3		Persentase Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah b3 (LB3) yang disediakan oleh Pelaku Usaha	100%	43.000.000,00	Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3		Persentase Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah b3 (LB3) yang disediakan oleh Pelaku Usaha	100%	43.000.000,00	
2.11.05.2.01.02	Sub Kegiatan : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		Jumlah Rekomendasi Izin yang diterbitkan	23 rekom	43.000.000,00	Sub Kegiatan : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		Jumlah Rekomendasi Izin yang diterbitkan	23 rekom	43.000.000,00	
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Persentase pelaku usaha yang taat pengelolaan LH	100%	315.152.310,00	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Persentase pelaku usaha yang taat pengelolaan LH	100%	315.152.310,00	
2.11.06.2.01	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Pengawasan terhadap ijin lingkungan	100%	315.152.310,00	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Pengawasan terhadap ijin lingkungan	100%	315.152.310,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.11.06.2.01.01	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH		Jumlah rekomendasi ijin lingkungan dan/atau izin PPLH	25 rekom	101.328.310,00	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH		Jumlah rekomendasi ijin lingkungan dan/atau izin PPLH	25 rekom	101.328.310,00	
2.11.06.2.01.03	Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha yang diawasi	125 pelaku usaha	213.824.000,00	Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha yang diawasi	125 pelaku usaha	213.824.000,00	
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait dengan PPLH		Prosentase jumlah MHA yang diakui	100%	26.980.000,00	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait dengan PPLH		Prosentase jumlah MHA yang diakui	100%	26.980.000,00	
2.11.07.2.01	Kegiatan : Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah Pengakuan Lembaga MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang di akui	1 lokasi	14.980.000,00	Kegiatan : Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah Pengakuan Lembaga MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang di akui	1 lokasi	14.980.000,00	
2.11.07.2.01.01	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		Jumlah usulan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH	1 Usulan	14.980.000,00	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		Jumlah usulan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH	1 Usulan	14.980.000,00	
2.11.07.2.02	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Persentase Peningkatan kapasitas MHA dan Kearifan lokal, Pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50%	12.000.000,00	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Persentase Peningkatan kapasitas MHA dan Kearifan lokal, Pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50%	12.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			(PPLH)					(PPLH)			
2.11.07.2.02.01	Sub Kegiatan : Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH		Jumlah lembaga MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang dibina	2 Lembaga	12.000.000,00	Sub Kegiatan : Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH		Jumlah lembaga MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang dibina	2 Lembaga	12.000.000,00	
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Persentase masyarakat yang mendapat pelatihan pengelolaan lingkungan hidup	69,63%	110.000.000,00	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Persentase masyarakat yang mendapat pelatihan pengelolaan lingkungan hidup	69,63%	110.000.000,00	
2.11.08.2.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi bidang Lingkungan Hidup	30,65%	110.000.000,00	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi bidang Lingkungan Hidup	30,65%	110.000.000,00	
2.11.08.2.01.01	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah kelompok atau desa yang dibina	35 kelompok/desa	30.000.000,00	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah kelompok atau desa yang dibina	35 kelompok/desa	30.000.000,00	
2.11.08.2.01.02	Sub Kegiatan : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan	5 Sekolah	80.000.000,00	Sub Kegiatan : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan	5 Sekolah	80.000.000,00	
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Persentase penyelesaian pengaduan LH tahun berjalan	90%	19.595.360,00	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Persentase penyelesaian pengaduan LH tahun berjalan	90%	19.595.360,00	
2.11.10.2.01	Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	19.595.360,00	Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	19.595.360,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					
2.11.10.2.01.01	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	10	19.595.360,00	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	10	19.595.360,00	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan		Persentase Area Pelayanan Persampahan	81,87%	9.273.252.043,00	Program Pengelolaan Persampahan		Prosentase Area Pelayanan Persampahan	81,87%	9.273.252.043,00	
2.11.11.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Sampah		Prosentase sampah yang dikelola	99%	12.650.000.000,00	Kegiatan : Pengelolaan Sampah		Prosentase sampah yang dikelola	99%	12.650.000.000,00	
2.11.11.2.01.03	Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Volume sampah yang tertangani	665.25 ton	8.750.000.000,00	Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Volume sampah yang tertangani	665.25 ton	8.750.000.000,00	
2.11.11.2.01.04	Sub Kegiatan : Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Volume sampah yang direduksi	18.757,49 ton	300.000.000,00	Sub Kegiatan : Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Volume sampah yang direduksi	18.757,49 ton	300.000.000,00	
2.11.11.2.01.07	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang tersedia	2 unit	3.600.000.000,00	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang tersedia	2 unit	3.600.000.000,00	

SUMBER : Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Tanah Bumbu, 2021

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab dalam

Khusus untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pengelolaan Persampahan / Pengelolaan Sampah	Angsana	Prosentase Area Pelayanan Persampahan dan Prosentase sampah yang dikelola	1 unit	Pengadaan mobil pengangkut sampah (musrenbang)/ Belum menjadi prioritas dlm kegiatan DLH dan usulan dapat dilaksanakan menggunakan dana desa
2	Program Pengelolaan Persampahan / Pengelolaan Sampah	Karang Indah / Angsana	Prosentase Area Pelayanan Persampahan dan Prosentase sampah yang dikelola	1 unit	Pengadaan Unit Angkutan Sampah (musrenbang)/ Belum menjadi prioritas dlm kegiatan DLH dan usulan dapat dilaksanakan menggunakan dana desa
3	-	Banjarsari/ Angsana	-	-	Bibit Tanaman /bukan merupakan kewenangan DLH diarahkan usulan ke KPH Kusan
4	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat / Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Makmur / Angsana	Persentase pelaku yang aktif dalam pengelolaan LH / Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi bidang LH	1 paket	Pembinaan bidang lingkungan hidup / dapat menggunakan dana desa dengan mengundang DLH sebagai narasumber

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
5	Program Pengelolaan Persampahan / Pengelolaan Sampah	Karang Bintang	Prosentase Area Pelayanan Persampahan dan Prosentase sampah yang dikelola	1 unit	Mesin Daur Ulang Sampah Plastik / Usulan dapat menggunakan dana desa
6	Program Pengelolaan Persampahan / Pengelolaan Sampah	Karang Bintang	Prosentase Area Pelayanan Persampahan dan Prosentase sampah yang dikelola	1 unit	Kendaraan Pengangkut Sampah / Usulan dapat menggunakan dana desa
7	Program Pengelolaan Persampahan / Pengelolaan Sampah	Karang Bintang	Prosentase Area Pelayanan Persampahan dan Prosentase sampah yang dikelola	6 unit	Tempat Sampah / Usulan dapat menggunakan dana desa
8	Program Pengelolaan Persampahan / Pengelolaan Sampah	Karang Bintang	Prosentase Area Pelayanan Persampahan dan Prosentase sampah yang dikelola	3 unit	Pembangunan TPS / Usulan dapat menggunakan dana desa
9	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat / Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kersik Putih / Batulicin	Persentase pelaku yang aktif dalam pengelolaan LH / Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi bidang LH	1 set	Pelatihan Keterampilan Daur Ulang Barang Bekas / dapat menggunakan dana desa dengan mengundang DLH sebagai narasumber
10	-	Sukamaju/ Batulicin	-	200 pohon	Bibit Tanaman /bukan merupakan kewenangan DLH diarahkan usulan ke KPH Kusan
11	Program Pengelolaan Persampahan / Pengelolaan Sampah	Karang Intan /Kuranji	Prosentase Area Pelayanan Persampahan dan Prosentase sampah yang dikelola	2 paket	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah di Sekolah /
12	-	Mangkal Api/ Kusan Hulu	-	1 unit	Kantor Bantu DLH/bukan merupakan kewenangan DLH
13	Program Pengelolaan Persampahan / Pengelolaan Sampah	BARugelang / Kusan Hilir	Prosentase Area Pelayanan Persampahan dan Prosentase sampah yang dikelola	5 unit	Penyediaan Pembuangan Sampah / Usulan dapat menggunakan dana desa
14	Program Pengelolaan Persampahan / Pengelolaan Sampah	Batarang / Kusan Hilir	Prosentase Area Pelayanan Persampahan dan Prosentase sampah yang dikelola	2 unit	Pembangunan Pembuangan Tempat sampah / Usulan dapat menggunakan dana desa
15	Program Pengelolaan Persampahan / Pengelolaan Sampah	Karya Bakti / Kusan Hilir	Prosentase Area Pelayanan Persampahan dan Prosentase sampah yang dikelola	1 unit	Pembangunan Pembuangan Tempat Pengolahan sampah / bukan kewenangan DLH
16	Program Pengelolaan Persampahan / Pengelolaan Sampah	Batuah / Kusan Hilir	Prosentase Area Pelayanan Persampahan dan Prosentase sampah yang dikelola	4 unit	Alat pengangkut sampah (tossa) / Usulan dapat menggunakan dana desa
17	Program Pengelolaan Persampahan / Pengelolaan Sampah	Gusunge / Kusan Hilir	Prosentase Area Pelayanan Persampahan dan Prosentase sampah yang dikelola	10 buah	Bak sampah / Usulan dapat menggunakan dana desa
18	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat / Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan	Sepakat / Mantewe	Persentase pelaku yang aktif dalam pengelolaan LH / Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi bidang LH	1 paket	Pelatihan Pemanfaatan Limbah Organik / dapat menggunakan dana desa dengan mengundang DLH sebagai narasumber

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
	Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
19	Program Pengelolaan Persampahan / Pengelolaan Sampah	Pulau Panjang / Simpang Empat	Prosentase Area Pelayanan Persampahan dan Prosentase sampah yang dikelola	10 paket	Pengadaan Tempat Sampah/ Usulan dapat menggunakan dana desa
20	Program Pengelolaan Persampahan / Pengelolaan Sampah	Gunung Besar / Simpang Empat	Prosentase Area Pelayanan Persampahan dan Prosentase sampah yang dikelola	5 unit	Pengadaan Armada Angkutan Sampah / Usulan dapat menggunakan dana desa
21	Program Pengelolaan Persampahan / Pengelolaan Sampah	Kampung Baru / Simpang Empat	Prosentase Area Pelayanan Persampahan dan Prosentase sampah yang dikelola	1 unit	Pembangunan Depo sampah / bukan kewenangan DLH
22	Program Pengelolaan Persampahan / Pengelolaan Sampah	Sarigadung / Simpang Empat	Prosentase Area Pelayanan Persampahan dan Prosentase sampah yang dikelola	-	Sarana Pengangkut Sampah / Usulan dapat menggunakan dana desa
23	Program Pengelolaan Persampahan / Pengelolaan Sampah	Sejahtera / Simpang Empat	Prosentase Area Pelayanan Persampahan dan Prosentase sampah yang dikelola	-	Pembebasan Lahan Depo sampah / bukan kewenangan DLH
24	Program Pengelolaan Persampahan / Pengelolaan Sampah	Pendamaran Jaya / Satui	Prosentase Area Pelayanan Persampahan dan Prosentase sampah yang dikelola	1 unit	Pengadaan Mobil Operasional Sampah / Usulan dapat menggunakan dana desa
25	Program Pengelolaan Persampahan / Pengelolaan Sampah	Pendamaran Jaya / Satui	Prosentase Area Pelayanan Persampahan dan Prosentase sampah yang dikelola	164 unit	Pengadaan Bak Sampah / Usulan dapat menggunakan dana desa
26	Program Pengelolaan Persampahan / Pengelolaan Sampah	Sebamban baru / sungai loban	Prosentase Area Pelayanan Persampahan dan Prosentase sampah yang dikelola	1 unit	Pembangunan Bank Sampah / bukan kewenangan DLH
27	Program Pengelolaan Persampahan / Pengelolaan Sampah	Sebamban baru / sungai loban	Prosentase Area Pelayanan Persampahan dan Prosentase sampah yang dikelola	1 Kegiatan	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga / Usulan dapat menggunakan dana desa
28	Program Pengelolaan Persampahan / Pengelolaan Sampah	Sari Mulya / sungai loban	Prosentase Area Pelayanan Persampahan dan Prosentase sampah yang dikelola	1 unit	Pengadaan Mobil Pengangkut Sampah / Usulan dapat menggunakan dana desa
29	Program Pengelolaan Persampahan / Pengelolaan Sampah	Damar Indah / sungai loban	Prosentase Area Pelayanan Persampahan dan Prosentase sampah yang dikelola	1 paket	Pengelolaan Sampah / Usulan dapat menggunakan dana desa

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu, 2021

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN TANAH BUMBU

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 10 Fokus Pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Secara rinci 10 (sepuluh) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5,8-6,5%
 - b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%
 - c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp 352,5
2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan
 - b. Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index 36-39

3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8
 - b. Nilai Tukar Petani 102-104
 - c. Nilai Tukar Nelayan 102-105
 - d. Ketersediaan Beras 44 juta ton
 - e. Ketersediaan protein hewani 2,7 juta ton
 - f. Nilai tambah tenaga kerja pertanian Rp. 54,3 juta/org/thn
4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Wirausaha 3%
 - b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%
 - c. UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%
5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit.
 - b. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi
 - c. Panjang jalan tol baru: 400 km
 - d. Penambahan Debit Air Baku 5 m³/s
 - e. Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR
 - f. Pembangunan akses sanitasi aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR
 - g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha
 - h. Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh
6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Masyarakat pengguna internet 79,20%
 - b. Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%
 - c. 72.500 SDM talenta digital
 - d. 12,4 juta local champion literasi digital
 - e. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi
 - f. 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber
7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan

capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Penurunan emisi GRK Nasional terhadap Baseline 26,87%
 - b. Penurunan intensitas Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 21,54%
 - c. Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%
 - d. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW
8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Tingkat kemiskinan 8,5-9%
 - b. Penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 87%
 - c. Rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial 60%
 - d. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk
9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%
 - b. Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%
 - c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%
 - d. 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)
 - e. 900 Paten Domestik
10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%
 - b. Insidensi TB 231/100.000 penduduk
 - c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91%
 - d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%
 - e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%
 - f. RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%
 - g. Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%
 - h. Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab.

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2022, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %

Kemudian pada tingkat Kabupaten Tanah Bumbu, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJPD tahun 2006-2025 dan Dokumen Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yaitu **“Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis”**. Sebagai upaya dalam mewujudkan Visi maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Ber Akhlak Mulia
2. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
4. Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri
5. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel.

Sedangkan rumusan tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah **“Memantapkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Untuk Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan”** dengan lima prioritas daerah, yaitu :

1. **Pembangunan SDM yang Memiliki Daya Saing Global**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:
 - a. Perbaikan Kualitas dan Akses Penyelenggaraan Pendidikan secara Luas;
 - b. Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan;
 - c. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - d. Peningkatan Upaya Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
 - e. Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting;
 - f. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja;
 - g. Peningkatan Kapasitas, Kompetensi dan Daya Saing Pemuda;
 - h. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga;
 - i. Peningkatan Layanan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan;
 - j. Peningkatan Akses dan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Pemberdayaan Perempuan;
 - k. Peningkatan Akses, Perlindungan, Pemberdayaan dan Pelayanan Bagi Kelompok Disabilitas, dan Lansia;
 - l. Peningkatan Kualitas Perlindungan Masyarakat.
2. **Pemulihan Investasi, Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Penanggulangan Kemiskinan**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan;
 - b. Peningkatan Produktifitas Pangan;
 - c. Peningkatan Jumlah Investor dan Nilai Investasi;
 - d. Peningkatan Produktifitas Usaha Mikro dan Kecil;
 - e. Peningkatan Kunjungan Wisatawan;
 - f. Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi;
 - g. Percepatan Penurunan Kemiskinan;
 - h. Perlindungan PMKS;
 - i. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial;
 - j. Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja.
3. **Pembangunan Infrastruktur yang terpadu dan Merata Berwawasan Lingkungan**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Sarana Prasarana Strategis Perkotaan;

- b. Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan Baru;
 - c. Peningkatan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas;
 - d. Penurunan Luasan Kawasan Kumuh;
 - e. Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum Aman;
 - f. Peningkatan Cakupan Akses Sanitasi Layak;
 - g. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman;
 - h. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir;
 - i. Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana;
 - j. Pengembangan Fungsi Ruang Terbuka;
 - k. Peningkatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
4. **Pembangunan Masyarakat yang Agamis**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:
- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan;
 - b. Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan Perorangan/Kelompok;
 - c. Peningkatan Musyawarah Antar Umat Beragama;
 - d. Peningkatan Pembinaan Pasangan Usia Subur;
 - e. Pembangunan Rumah Tahfiz di setiap Desa.
5. **Pemantapan Pelayanan Pemerintahan dan Penyederhaan Birokrasi yang Bersih, Berwibawa dan Profesional**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :
- a. Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan;
 - b. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima;
 - c. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
 - d. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah;
 - e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah;
 - f. Peningkatan Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - g. Peningkatkan Status dan Kemajuan Kemandirian Desa;
 - h. Peningkatkan Penyediaan Data dan Informasi Dasar Bagi Pembangunan Desa

i. Mendukung Percepatan Penyederhaan Birokrasi.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Makro yang ditetapkan Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2022, antara lain meliputi :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.72 - 0.78 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.02 - 5.88 %
3. Indeks Kesolehan Sosial 68.00 - 68.58
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71.91 - 72.15
5. Infrastruktur yang Mantap 52.06 - 56.98 %
6. Tingkat Kemiskinan sebesar 4.29 - 4.19 %
7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 76.15 - 76.83
8. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 60.69 - 60.91 (CC)
9. PDRB Sub Sektor Pertanian (ADHB) 1.64 - 2.50 %
10. PDRB Sub Sektor Perikanan (ADHB) 3.56 - 3.72 %
11. PDRB Sub Sektor Perkebunan (ADHB) 1.06 - 2.24 %
12. PDRB Sub Sektor Peternakan (ADHB) 1.90 - 2.26 %
13. PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB) 0.36 - 5.84 %
14. Pertumbuhan Investasi 9.96 - 10.02 %

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup mendukung pencapaian focus pembangunan Nasional ke-7 yaitu **Pembangunan Rendah Karbon dilakukan untuk Meningkatkan Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)** dan prioritas daerah Kab. Tanah Bumbu ke-3, yaitu **“Pembangunan Infrastruktur yang terpadu dan Merata Berwawasan Lingkungan”**.

Terkait dengan focus pembangunan ke-7, sesuai dengan sasaran pembangunan Nasional Renstra KLHK 2020-2024, penurunan emisi GRK dan komponen lainnya adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Sasaran	Baseline 2019	Sasaran tahun ke -				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah	-	16,28	16,75	17,22	17,38	17,54
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,56	68,71	68,96	69,22	69,48	69,74
	- Indeks Kualitas Air	52,62	55,1	55,2	55,3	55,4	55,5
	- Indeks Kualitas Udara	84,1	84,1	84,2	84,3	84,4	84,5

No.	Indikator Sasaran	Baseline 2019	Sasaran tahun ke -				
			2020	2021	2022	2023	2024
	- Indeks Kualitas Air Laut	58,5	58,5	59	59,5	60	60,5
	- IKTL	61,6	61,6	62,5	63,5	64,5	65,5
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	50,9	61	63	65	67	70

Dalam rangka mendukung pencapaian target nasional, maka Kabupaten Tanah Bumbu membuat turunan target penurunan emisi GRK skala Kabupaten yang juga dituangkan pada sasaran RPJMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tahun	Kondisi Awal 2019 (data tahun 2018)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tingkat Emisi (Gg CO ₂ -eq)	2,289	2,114	2,085	2,055	2,029	2,003	1,984
Target Penurunan (%)	Baseline	0,175	0,204	0,234	0,260	0,286	0,305
Range penurunan		0.162 - 0.188	0.189 - 0.210	0,211 - 0,257	0,258 - 0,262	0,263 - 0,290	0,291 - 0,319

Upaya penurunan emisi GRK merupakan salah satu langkah peningkatan kualitas udara. Posisi geografis Indonesia tak terkecuali Tanah Bumbu sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim sehingga perlu dilakukan upaya untuk menanggulangi dampak tersebut melalui upaya mitigasi perubahan iklim bersama masyarakat. Sesuai dengan amanat PermenLHK No 19 tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim (Proklam) dengan salah satu manfaatnya memberikan kontribusi dalam pencapaian target penurunan GRK melalui penciptaan masyarakat yang memahami permasalahan perubahan iklim dan dampaknya serta melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara proaktif yang berkontribusi dalam pencapaian pembangunan nasional yang berkelanjutan. Strategi penurunan emisi GRK melalui Proklam telah dilaksanakan DLH sejak tahun 2019 dan dilanjutkan pelaksanaannya yang terakomodir pada Renstra DLH TA. 2021-2026 dengan sasaran 1 Lokasi Desa yang diusulkan menjadi Kampung Iklim setiap tahunnya. DLH bekerja sama dengan pihak swasta untuk mendorong, mendukung dan rutin membina desa yang berpotensi melakukan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim diantaranya sebagai berikut :

- Upaya adaptasi perubahan iklim : Pengendalian kekeringan, banjir dan

longsor; Peningkatan ketahanan pangan; penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi; pengendalian penyakit terkait iklim; kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim.

- Upaya mitigasi perubahan iklim : penggunaan lahan pertanian rendah emisi GRK; penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi & penghematan energi; pengelolaan sampah, limbah padat & cair; peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi; pencegahan dan/atau penanggulangan karhutla; kegiatan lainnya yang terkait dengan upaya penurunan emisi GRK.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022, yaitu : **Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan kerusakan LH** dengan indikator tujuan “**Prosentase Paramater Kualitas Lingkungan yang Memenuhi Baku Mutu**”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
3. Meningkatnya penataan lingkungan hidup
4. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan

dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Persentase pemanfaatan dokumen Lingkungan Hidup Kabupaten
- b. Prosentase Paramater kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu

- c. Prosentase ketaatan kegiatan dan/atau usaha dalam pengelolaan lingkungan
- d. Prosentase pengelolaan sampah

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

Kabupaten Ranau Danau Ranau 2022													
Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Target Kinerja					
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)		(2)	(3)		(4)		(5)	(6)					
1	Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1	Meningkatnya Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	1	Indeks kualitas air (IKA)	indeks	55	55,55	56,11	56,67	57,23	57,81
					2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	indeks	91,27	91,38	91,48	91,59	91,69	91,79
					3	Pemenuhan data dukung pengendalian emisi GRK	%	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan pengendalian kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	2	Meningkatnya pengelolaan lahan sesuai kewenangan	4	Peningkatan pengelolaan Lahan sesuai kewenangan	%	0	72.73	77.27	81.82	95.45	95.45
3	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	3	Meningkatnya Upaya penanganan dan Pengurangan sampah	5	Persentase Volume sampah terangkut	%	74	73	72	71	70	70
					6	Persentase volume sampah yang direduksi	%	24	26	27	28	30	30

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu, 2021 (sesuai renstra)

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja							
						2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							
1	Meningkatkan kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	0.162 - 0.188	0.189 - 0.210	0,211 - 0,257	0,258 - 0,262	0,263 - 0,290	0,291 - 0,319
					2	Indeks Kualitas Air (IKA)	indeks	59,00-61,00	61,01-61,33	61,34-61,66	61,67-61,99	62,00-62,34	62,35-62,65
					3	Indeks Kualitas Udara	indeks	94.30 - 95.06	95.07 - 95.23	95.24 - 96.02	96.03 - 96.19	96.20 - 96.98	96.99 - 97.15
			2	Meningkatnya Tutupan Lahan	4	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	indeks	57.15 - 59.65	59.66 - 59.70	59.71 - 62.19	62.20 - 62.26	62.27 - 64.79	64.80 - 64.86

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Target Kinerja					
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Infrastruktur yang Mantap	1	Meningkatnya kualitas air minum dan sanitasi	1	Cakupan akses sanitasi layak	%	70.00 - 74.00	74.01 - 80.00	80.01 - 86.00	86.01 - 92.00	92.01 - 95.99	96.00 - 98.00

Sesuai RPJMD

Untuk mencapai target tujuan dan sasaran, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan Indikator Kinerja yang mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri 18 tahun 2020, indikator tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.2
Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

NO	INDIKATOR	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota			Ada				Ada				
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota			Ada				Ada				
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi			Ada				Ada				
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air			60	65,84	66,17	66,50	60	65,84	66,17	66,50	
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara			94,21	94,68	95,15	95,63	94,21	94,68	95,15	95,63	
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan			60,32	58,40	59,68	60,95	60,32	58,40	59,68	60,95	
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota			70,37	70,90	71,43	71,96	70,37%	70,90	71,43	71,96	
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota			2	2	2	2	2	2	2	2	
9	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.			100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Timbulan sampah yang ditangani			72,08	73,61	75,17	76,76	74,00%	73,61	75,17	76,76	
11	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R			19,89	20,84	21,82	22,86	24,00%	20,84	21,82	22,86	
12	Persentase cakupan area pelayanan			899,73	904,68	909,66	914,67	68,46%	904,68	909,66	914,67	
13	Persentase jumlah sampah yang tertangani			72,08	73,61	75,17	76,76	74,00%	73,61	75,17	76,76	
14	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA dikabupaten/ kota			75,72	76,38g	77,05	77,72	76,38	76,38g	77,05	77,72	

Tabel 3.3
Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu
Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

NO	INDIKATOR	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota			70,39	70,77	71,15	71,54	70,39	70,77	71,15	71,54	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota			82,98	83,28	83,58	83,88	82,98	83,28	83,58	83,88	
	Ketaatan penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota			8,64	9,25	9,91	10,61	8,64	9,25	9,91	10,61	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH BUMBU

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 serta Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Secara khusus, Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)” dan indikator sasaran “Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, % Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)”;
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2022 adalah sebanyak 9 (sembilan) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 8 (delapan) program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2022 adalah sebanyak 19 kegiatan, dan 38 sub Kegiatan;
3. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 27.326.667.995,00 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, dengan perincian :
 - a. Rp. 14.572.875.422,00 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin).
 - b. Rp. 12.753.792.573,00 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan.

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BID. LH								
2.11.2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Pemenuhan data dok perencanaan LH		83,33%	243.694.400,00	APBD	-	85%	390.000.000,00
2.11.2.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH) Kab/Kota	Persentase Pemenuhan Data Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)		100%	25.000.000,00	APBD	-	100%	70.000.000,00
2.11.2.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kab/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi LH		1 dok	25.000.000,00	APBD	-	2 dok	70.000.000,00
2.11.2.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota	Persentase Pemenuhan Data Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)		100%	218.694.400,00	APBD	-	100%	320.000.000,00
2.11.2.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Tata Ruang		1 dok	218.694.400,00	APBD	-	1 dok	320.000.000,00
2.11.3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan parameter kualitas lingkungan		90,42 %	831.533.960,00			90,83 %	1.029.602.206,00
2.11.3.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Presentase pemenuhan data kualitas air, udara dan tanah		65%	591.323.960,00	APBD	-	65%	691.102.206,00
2.11.3.2.01.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah sampel air, udara dan tanah		340 sampel	339.238.960,00	APBD	-	350 sampel	391.102.206,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.3.2.01.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Lokasi yang diusulkan menjadi Kampung Iklim		1 lokasi	252.085.000,00	APBD	-	1 lokasi	300.000.000,00
2.11.3.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase lahan sangat kritis di sempadan sungai yang dipulihkan		25%	240.210.000,00	APBD		50%	338.500.000,00
2.11.3.2.03.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas lahan sangat kritis di sempadan sungai yang direhabilitasi		2 Ha	240.210.000,00	APBD	-	2 Ha	338.500.000,00
2.11.4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		72,73%	3.328.030.000,00	APBD	-	77,27%	4.500.000.000,00
2.11.4.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Keanekaragaman Hayati yang dikelola sesuai dengan kewenangan		16 lokasi	3.328.030.000,00	APBD	-	18 lokasi	4.500.000.000,00
2.11.4.2.01.4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang dikelola		16 lokasi	3.328.030.000,00	APBD	-	17 lokasi	4.500.000.000,00
2.11.5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	persentase pelaku usaha yang memenuhi ijin Pengelolaan Limbah Bahan Beracun		53%	43.000.000,00	APBD		61,67%	100.000.000,00
2.11.5.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah b3 (LB3) yang disediakan oleh Pelaku Usaha		100%	43.000.000,00	APBD		100%	100.000.000,00
2.11.5.2.01.2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Rekomendasi Izin yang diterbitkan		23 rekomendasi	43.000.000,00	APBD		28 rekomendasi	100.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat pengelolaan LH		100%	315.152.310,00	APBD		100%	271.667.775,00
2.11.6.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelaksanaan pengawasan terhadap ijin lingkungan		100%	315.152.310,00	APBD		100%	271.667.775,00
2.11.6.2.01.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi ijin lingkungan dan/atau ijin PPLH		25 rekomendasi	101.328.310,00	APBD		25 rekomendasi	34,000,000,00
2.11.6.2.01.3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang diawasi		125 pelaku usaha	213.824.000,00	APBD		130 pelaku usaha	237,667,775,00
2.11.7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Prosentase jumlah MHA yang diakui		100%	14.980.000,00	APBD		100%	30,000,000.00
2.11.7.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Pengakuan Lembaga MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang di akui (lokasi)		1 lokasi	14.980.000,00	APBD		1 lokasi	30,000,000.00
2.11.7.2.01.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah usulan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH (lokasi)		1 usulan	14.980.000,00	APBD		1 usulan	30,000,000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.7.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Prosentase peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait PPLH		50%	12.000.000,00	APBD		50%	35.000.000,00
2.11.7.2.02.1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah lembaga MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang dibina		2 lembaga	12.000.000,00	APBD		2 lembaga	35.000.000,00
2.11.8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pelaku yang aktif dalam pengelolaan LH		69,63 %	110.000.000,00	APBD		80,00%	185.145.000,00
2.11.8.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi bidang LH		33,33%	110.000.000,00	APBD		33,33%	185.145.000,00
2.11.8.2.01.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kelompok atau desa yang dibina		45 (kel/desa)	30.000.000,00	APBD		45 (kel/desa)	45.145.000,00
2.11.8.2.01.2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan		5 sekolah	80.000.000,00	APBD		5 sekolah	140.000.000,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian pengaduan LH tahun berjalan		90%	19.595.360,00	APBD		90%	23.246.549,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti		100%	19.595.360,00	APBD		100%	23.246.549,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.10.2.01.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		10 pengaduan	19.595.360,00	APBD		10 pengaduan	23,246,549,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Area Pelayanan Persampahan		81.87%	9.273.252.043,00	APBD		85,80	13.350.000.000,00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Prosentase sampah yang dikelola		99.00%	9.273.252.043,00	APBD		99%	13.350.000.000,00
2.11.11.2.01.3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Volume sampah yang tertangani (ton)		52.665,25 ton	7.599.056.043,00	APBD		53.416,77 ton	9,000,000,000,00
2.11.11.2.01.4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam pengelolaan persampahan		4 kelompok	207.639.000,00	APBD		6 kelompok	350,000,000,00
2.11.11.2.01.7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang tersedia		2 unit	1.466.557.000,00	APBD		2 unit	4,000,000,000,00
2.11.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.11.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	53.057.400,00	APBD		100%	125.000.000,00
2.11.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah		12 bulan	25.110.900,00	APBD		12 bulan	90,000,000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Telaksananya koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 bulan	27.946.500,00	APBD		12 bulan	35.000.000,00
2.11.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik		100%	6.137.664.386,00	APBD		100%	7.950.000.000,00
2.11.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN		12 bulan	5.768.131.386,00	APBD		12 bulan	7.450.000.000,00
2.11.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 bulan	369.533.000,00	APBD		12 bulan	500.000.000,00
2.11.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1.057.130.000,00	APBD		100%	1.860.000.000,00
2.11.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		37 unit	175.772.750,00	APBD		55 unit	650.000.000,00
2.11.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang disediakan		12 bulan	226.453.500,00	APBD		12 bulan	450.000.000,00
2.11.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		2 Media/Buku/ Eksemplar	106.766.100,00	APBD		2 Media/Buku/ Eksemplar	160.000.000,00
2.11.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		143 kali	548.137.650,00	APBD		200 kali	600.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100%	224.842.000,00	APBD		100%	100.000.000,00
2.11.1.2.07.10	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun		2	224.842.000,00	APBD		1	100.000.000,00
2.11.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	419.321.200,00	APBD		100%	690.000.000,00
2.11.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia		12 bulan	150.577.800,00	APBD		12 bulan	250.000.000,00
2.11.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 bulan	268.743.400,00	APBD		12 bulan	440.000.000,00
2.11.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik		100%	2.853.048.390,00	APBD		100%	4.900.000.000,00
2.11.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara		12 bulan	2.653.620.750,00	APBD		12 bulan	4.500.000.000,00
2.11.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpeliharaan/terpelihara		2 unit	199.427.640,00	APBD		1 unit	400.000.000,00
2.11.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Akreditasi Badan Layanan Usaha Daerah		226	3,500,000,000	APBD		236	4.200.000.000,00
2.11.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jenis Layanan dan penunjang BLUD yang disediakan (layanan)		11 layanan	3,500,000,000	APBD		11 layanan	4.200.000.000,00

BAB V

PENUTUP

BAB V

P E N U T U P

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Lingkungan Hidup pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup ini berpedoman pada Rancangan Awal Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026.
3. Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Lingkungan Hidup ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022;
2. berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 untuk setiap triwulannya;
2. Pemetaan terhadap rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2022 dengan mengacu pada nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2022.

Batulicin, Juli 2021

KEPALA DINAS



MAHRIYADI NOOR, S.Sos, MA
NIP.19660118 198602 1 003